

Legalisasi Dokumen Perceraian Islam untuk Digunakan di Wilayah Hukum Jerman *Legalisation von islamischen Scheidungsdokumenten für die Nutzung im deutschen Rechtsbereich*

1. Akta Perceraian / *Scheidungsurkunde*

Akta Perceraian bagi muslim diterbitkan oleh *Pengadilan Agama* yang berwenang membawahi domisili tempat tinggal sesuai KTP berdasarkan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut (lihat poin 5). Akta Perceraian ini harus dilegalisasi awal oleh Mahkamah Agung RI (Direktorat Peradilan Agama), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Setelah legalisasi awal oleh MA dan dua kementerian maka akta ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Kemudian Kedutaan Besar Jerman di Jakarta akan melegalisasi akta aslinya.

Für Muslime stellt das örtlich für den registrierten Wohnsitz zuständige Religionsgericht (Pengadilan Agama) eine Scheidungsurkunde auf Basis des Scheidungsurteils (siehe Punkt 5) aus. Die Scheidungsurkunde ist vom Obersten Gerichtshofs (Direktorat für religiöse Gerichtsbarkeit), vom Justizministerium und vom Außenministerium vorzulegalisieren. Nach der Vorlegalisation durch die drei Instanzen wird die Urkunde ins Deutsche übersetzt. Anschließend wird die Originalurkunde von der dt. Botschaft legalisiert.

Perkiraan biaya / *Voraussichtliche Kosten*:

- Legalisasi MA / *Legalisation OGH 1 Dokumen* = 20,00 €
- Legalisasi Kemenkumham / *Legalisation Justizministerium 1 Dokumen* = 20,00 €
- Legalisasi Kemenlu / *Legalisation Außenministerium 1 Dokumen* = 17,50 €
- Terjemahan / *Übersetzung* = 35,00 €
- Legalisasi Kedubes Jerman 1 Dokumen / *Legalisation dt. Botschaft 1 Dokument* = 25,00 €

2. Putusan Cerai / *Scheidungsurteil*

Putusan Cerai diterbitkan oleh *Pengadilan Agama* yang membawahi wilayah tempat tinggal sesuai KTP setelah melalui proses sidang gugatan/permohonan cerai. Khusus bagi pasangan yang bercerai atas dasar permohonan mantan suami, maka akan ada tambahan dokumen penetapan ikrar talak yang juga akan harus ikut dilegalisasi dan diterjemahkan. Putusan cerai (dan—jika ada—Penetapan Ikrar Talak) ini harus dilegalisasi awal oleh Mahkamah Agung RI (Direktorat Peradilan Agama), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Setelah legalisasi awal oleh MA dan dua kementerian maka putusan ini seluruhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Kemudian Kedutaan Besar Jerman di Jakarta akan melegalisasi putusan keterangan aslinya.

Das Scheidungsurteil stellt das örtlich für den registrierten Wohnsitz zuständige Religionsgericht (Pengadilan Agama) nach Scheidungsklage- bzw. -antragsprozess aus. Bei Scheidungsantrag durch den Exmann gibt es zusätzlich einen Beschluss über den Vollzug des Ehefrauverstoßungsspruches (Penetapan Ikrar Talak). Das Scheidungsurteil (und evtl. der Verstoßungsspruchsbeschluss) ist vom Obersten Gerichtshofs (Direktorat für religiöse Gerichtsbarkeit), vom Justizministerium und vom Außenministerium vorzulegalisieren. Nach der Vorlegalisation durch die drei Instanzen wird das Urteil und evtl. der Beschluss ins Deutsche übersetzt. Anschließend wird das Urteil und evtl. der Beschluss von der dt. Botschaft legalisiert.

Perkiraan biaya / *Voraussichtliche Kosten*:

- Legalisasi MA / *Legalisation OGH 1 Dokumen* = 20,00 €
- Legalisasi Kemenkumham / *Legalisation Justizministerium 1 Dokumen* = 20,00 €
- Legalisasi Kemenlu / *Legalisation Außenministerium 1 Dokumen* = 17,50 €
- Legalisasi Kedubes Jerman 1 Dokumen / *Legalisation dt. Botschaft 1 Dokument* = 45,00 €

- Terjemahan putusan dihitung berdasarkan jumlah halaman asli dokumen putusan cerai ditambah 1 halaman cap legalisasi yang perlu ikut diterjemahkan juga dengan harga €35,00 per halaman. / *Die Übersetzung werden nach der Anzahl der Seiten des Originalurteils + 1 Seite Legalisationsvermerke, die mitübersetzt werden wird, mit 35,00 € pro Seite berechnet.*

Ket. / Anm.: Biaya legalisasi MA, Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedubes Jerman akan dikalikan 2 jika ada Penetapan Ikrar Talak (dalam hal permohonan cerai diajukan oleh mantan suami), dan biaya terjemahan juga akan bertambah. / *Die Kosten der Legalisationen von OGH, Justizministerium, Außenministerium und der deutschen Botschaft verdoppeln sich und die Übersetzungskosten steigern entsprechend bei Vorhandensein von Verstoßungsspruchsbeschluss (im Falle, dass die Scheidung vom Exmann beantragt wurde).*

3. Akta Perkawinan dari Perkawinan Sebelumnya / Heiratsurkunde der Vorehe

Kutipan akta perkawinan dari perkawinan sebelumnya (dari perkawinan yang diceraikan melalui putusan dan akta cerai di atas) biasanya diminta oleh pengadilan tinggi di Jerman guna mengakui putusan perceraian tersebut di atas. Karena berdasarkan undang-undang di Indonesia, jika perkawinan telah diceraikan, maka kutipan tersebut dicabut oleh pengadilan yang menceraikannya (Pasal 75 ayat 3 PerPres Nr. 25/2008). Selain itu Kemenag juga tidak bersedia melegalisasi akta perkawinan dari perkawinan yang telah diceraikan. Oleh karena itu maka kutipan akta asli tersebut tidak mungkin diperoleh kembali dan tidak mungkin untuk dilegalisasi, karena untuk menghindari penyalahgunaan. Untuk itu perlu dibuatkan fotokopinya (jika bisa, fotokopi yang disahkan sesuai aslinya dan ditambahkan keterangan bahwa perkawinan ini telah diceraikan). Fotokopi dapat diperoleh dari pengadilan negeri/pengadilan agama yang menceraikan atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/KUA tempat perkawinan dulu dicatatkan. Fotokopi ini hanya dapat diterjemahkan saja ke dalam bahasa Jerman. Jika pengadilan tinggi Jerman tetap bersikeras untuk minta akta perkawinan terdahulu dilegalisasi hingga kedubes Jerman, maka perlu dimintakan Surat Keterangan Tentang Arsip Perkawinan yang telah diceraikan dari KUA yang bersangkutan dan surat ini yang akan dilegalisasi. Hal penting untuk dapat melegalisasi surat keterangan ini adalah spesimen tanda tangan dan cap dinas dari pejabat KUA yang menandatangani surat keterangan ini. Lebih lanjut mengenai hal ini beserta contoh akan diterangkan jika perlu.

Die Heiratsurkunde der (durch das o.g. Scheidungsurteil geschiedene) Vorehe wird in der Regel vom OLG in Deutschland beim Verfahren der Anerkennung einer ausländischen Gerichtsentscheidung in Ehesache (des o.g. Scheidungsurteils) verlangt. Es ist per Präsidentenverordnung (§ 75 Abs. 3 PerPres Nr. 25/2008) geregelt, dass der Auszug aus dem Heiratseintrag (sog. Heiratsurkunde) gegen der Scheidungsurkunde zu tauschen ist, d.h. die Heiratsurkunde der geschiedene Ehe wird entzogen und kann nicht mehr verwendet werden. Diese Heiratsurkunde kann man nicht mehr legalisieren. Das für die erste Legalisation zuständige Religionsministerium legalisiert im Prinzip keine Heiratsurkunde von der Ehe, die bereits geschieden ist. Dies aus dem Grund, um Missbrauch zu vermeiden. Hierzu muss man sich eine Kopie besorgen (falls möglich, eine beglaubigte Kopie mit Scheidungsvermerk). Die Fotokopie erhält man beim Scheidungsgericht oder beim Standesamt/KUA. Diese Fotokopie wird lediglich ins Deutsche übersetzt. Besteht das OLG jedoch auf die Legalisation der Eheurkunde der Vorehe, so kann vom Heirats-KUA eine Bescheinigung über die Eheschließung der aufgelösten Ehe beantragt werden, die anschließend zu legalisieren ist. Wichtig für die Legalisation dieser Bescheinigung ist die Unterschriften- und Dienstsiegelprobe des ausstellenden Beamten vom Heirats-KUA. Näheres hierüber samt Beispielbescheinigung wird erklärt, falls der Fall eintritt

Perkiraan biaya / *Voraussichtliche Kosten:*

- Terjemahan / *Übersetzung* = 35,00 €

(Jika perlu, hanya dalam hal surat keterangan, bukan fotokopi) legalisasi / *Falls erforderlich (nur für die oben erwähnte Bescheinigung): Legalisationen,*

- Legalisasi Kemenkumham / *Legalisation Justizministerium 1 Dokument* = 20,00 €
- Legalisasi Kemenlu / *Legalisation Außenministerium 1 Dokument* = 17,50 €
- Legalisasi Kedubes Jerman 1 Dokument / *Legalisation dt. Botschaft 1 Dokument* = 45,00 €

4. Biaya lain-lain / *Sonstige Kosten:*

- Jasa dan transpor untuk legalisasi Kedubes Jerman 1 x /
Aufwandentschädigung für den Botschafts gang 1 x = 15,00 €
- Pengiriman dari Indonesia ke Jerman per DHL Express International 1 x /
Versandkosten aus Indonesien nach Deutschland (DHL Express International) 1 x = 47,00 €

Catatan / *Anm.:*

- Semua dokumen tersebut di atas, dan beberapa lampiran harus diserahkan dalam bentuk dokumen asli.
Alle vorstehend genannten Dokumente und bestimmte Begleitunterlagen werden im Original verlangt.
- Jika pengurusan legalisasi hendak dikuasakan kepada kami, mohon isi dan tanda tangani (di atas meterai Rp6.000) blangko surat kuasa di bawah ini. Mohon data penerima kuasa dikosongkan untuk menghindari kesalahan data.
Bei Bevollmächtigung der Legalisation sind die beiden nachstehenden Vollmächte auszufüllen und auf Gebührenmarke zu Rp6.000 zu unterschreiben. Bitte lassen Sie die Daten des/der Bevollmächtigten leer, um Angabenfehler zu vermeiden.

SURAT KUASA

Power of Attorney

Yang bertanda tangan di bawah ini,
I, the undersigned,

Nama:
Name:

Tempat/tanggal lahir:
Place/date of birth:

No. KTP/paspor:
ID card/passport number:

Alamat:
Address:

memberi kuasa penuh kepada
hereby appoint

Nama:
Name:

No. KTP/paspor:
ID card/passport number:

Alamat:
Address:

untuk mengurus legalisasi dokumen saya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di Jakarta.
as my attorney in fact to process the authentication of my documents with the Supreme Court of the Republic Indonesia, c.q. Directorate General of Religious Jurisdiction, in Jakarta.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal di bawah ini dan tetap berlaku sepenuhnya hingga akhir proses legalisasi.
This Power of Attorney is made for proper perusal and the power shall be in full force and effect on the date below and shall remain in full force and effect until the end of the authentication process.

.....,
(tempat / place) (tanggal / date)

Pemberi kuasa,
Principal,

Yang menerima kuasa
Attorney in fact

meterai
Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)